

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Untuk itu, maka pelaksanaan pembangunan menuntut keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan. Unsur lain yang tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan ini, selain keterlibatan semua pihak juga peningkatan potensi sumber daya manusia. Pada dasarnya menyiapkan sumber daya manusia berkaitan erat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan, sehingga pada saatnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Dalam kaitan ini, pendidikan mempunyai peran sentral dan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia, sebab kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai manusia baik secara individu maupun kelompok dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat membekali manusia menjadi insan cerdas, terampil dan bertanggung jawab. Setiap orang sebagai individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, sehingga terbentuk manusia terdidik yang mempunyai kemampuan untuk memahami diri dan lingkungannya, menyesuaikan diri atau menjadi pelaku dari suatu perubahan, serta mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Dengan pendidikan diharapkan manusia dapat menghadapi tantangan dimasa-masa yang akan datang serta menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri dan bertanggung jawab (*sense of responsibility*). Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia peserta didik untuk memenuhi kebutuhan hidup secara material maupun non material dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas kehidupan di masa yang akan datang.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu berpikir kritis dan analitis terhadap berbagai fenomena yang muncul, di antaranya dengan kemajuan ekonomi global yang terjadi, sehingga permasalahan yang timbul akan dapat diminimalisasi dan dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Tilaar (2000, hlm. 258) menyatakan bahwa “sejalan dengan perubahan kehidupan ekonomi, terjadi pula perubahan pola pendidikan dan pola kerja. Perubahan pola pendidikan dan pekerjaan terjadi karena adanya dinamika dan pembangunan yang terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman”. Perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku manusia yang berkualitas akan bersifat peka dan adaptif terhadap perubahan yang berlangsung dalam kehidupannya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menurut Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat ditempuh melalui tiga jalur pendidikan, yaitu di lingkungan keluarga (pendidikan informal), di sekolah (pendidikan formal) dan di masyarakat (pendidikan nonformal). Pada dasarnya, ketiga jalur pendidikan tersebut saling berkaitan dan saling menopang, serta memiliki kedudukan yang sama yang dikenal dengan “Tri pusat pendidikan” Sudjana (2010, hlm. 42). Tri pusat pendidikan mengisyaratkan bahwa program pendidikan informal berpusat pada keluarga dan lingkungan kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan formal berpusat pada lingkungan sekolah dengan jenjang dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sementara itu, program pendidikan nonformal berpusat pada lingkungan masyarakat atau lembaga dengan berbagai jenis pendidikan, di antaranya pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Melalui sinergi tri pusat pendidikan, manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan di masa depan serta menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri dan bertanggungjawab. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Bab II pasal 3 yang menjelaskan bahwa: “Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dampak lanjut dari tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan keniscayaan yang menopang lajunya pembangunan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tentu tidak akan terpenuhi atau tercapai jika hanya mengandalkan program pendidikan formal (sekolah) semata. Sudjiarto (1992, hlm. 3), menyatakan ada tiga hal penting yang dapat memperjelas hal tersebut, yakni: (1) tidak semua warga negara khususnya usia sekolah memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan formal; (2) adanya keterbatasan program pendidikan formal, baik pada hakekat maupun peranannya untuk memikul tanggungjawab pelaksanaan fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional; dan (3) masyarakat terus berubah dan berkembang secara cepat, sementara pendidikan formal sangat terbatas. Untuk itu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional perlu didukung oleh adanya program pendidikan nonformal.

Pendidikan nonformal mempunyai sumbangan yang berarti bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Tidak semua warga masyarakat dapat menikmati pendidikan persekolahan, bagi mereka yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan persekolahan dapat menempuh jalur pendidikan nonformal. Oleh karena itu pendidikan nonformal tidak dapat dipandang dengan sebelah mata karena telah terbukti sangat besar kontribusinya dalam pembangunan di bidang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Sudjana (1993, hlm. 203-204) menyatakan dalam mengembangkan masyarakat, pendidikan nonformal berperan dalam tiga hal, yaitu: (1) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka membebaskan diri dari kebodohan, imbalan atau upah kerja yang rendah dan ketidakadilan dalam masyarakat; (2) membantu masyarakat untuk bisa hidup berorganisasi sehingga secara bersama dapat mempelajari kehidupannya serta menjajagi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti permodalan, bahan, alat yang dibutuhkan dan pemasaran serta informasi yang diperlukan; dan (3) para pendidik dan tutor bekerja bersama dengan organisasi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan pranata sosial, politik dan lingkungan

masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka mampu memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum faktor yang melatarbelakangi berkembangnya pendidikan nonformal di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) kemiskinan adalah salah satu masalah utama Indonesia yang tentunya dapat menyebabkan masalah-masalah lainnya dalam kehidupan bermasyarakat terutama pada sektor pendidikan, seperti buta huruf, putus sekolah dan urbanisasi; (2) tuntutan dunia kerja. Dunia kerja cenderung mensyaratkan karyawannya memiliki pendidikan formal serta keahlian atau keterampilan tertentu. Kondisi ini pun mendorong pemerintah dan masyarakat mendirikan tempat kursus dan pelatihan keterampilan hidup sebagai bentuk dari program-program pendidikan nonformal; dan (3) keterbatasan kesempatan bersekolah. Keterbatasan kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah formal mendorong meningkatnya minat masyarakat akan pendidikan nonformal yang berfungsi mengatasi permasalahan tersebut.

Pendidikan nonformal merupakan suatu proses pendidikan yang sasaran, pendekatan, dan keluarannya berbeda dengan pendidikan formal. Unesco (Sudjana, 2010, hlm. 5) menjelaskan bahwa “pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman yang lebih longgar dibandingkan dengan tingkat keketatan dan keseragaman pendidikan formal.” Pendidikan nonformal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan formal umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Berkenaan dengan dinamika masyarakat, pendidikan nonformal berperan dalam mempersiapkan manusia sebagai ‘pembelajar seumur hidup’. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menuntut manusia untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Untuk menjawab tantangan ini, maka masyarakat perlu mempunyai kemampuan belajar, yaitu mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Pengangguran dan kemiskinan yang disebut sebagai faktor berkembangnya pendidikan nonformal di Indonesia, masih menjadi masalah besar yang memerlukan perhatian dari semua komponen bangsa. Kondisi Indonesia sebagai

negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk dengan rincian usia kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2011 sebanyak 3.449.307 jiwa, dan pengangguran 188.590 jiwa (BPS Lampung, 2012). Pada Agustus 2011 menunjukkan jumlah angkatan kerja Kota Bandar Lampung sebanyak 418.820 orang atau 68,18% dari penduduk usia kerja (BPS Provinsi Lampung, 2012, hlm. 1). Dari jumlah tersebut tercatat 47.825 (11,42%) orang merupakan pengangguran terbuka. Angka pengangguran pun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan kerja yang dibutuhkan masyarakat.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Dirjen PNFI (2008, hlm. 1-2), menjelaskan beberapa komponen yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia di antaranya: (1) jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara *supply and demand*), (2) kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (*mis-match*), (3) masih adanya anak putus sekolah maupun lulusan yang tidak melanjutkan namun tidak terserap dunia kerja atau berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (*unskill labour*), dan (4) melimpahnya sumber daya alam di daerahnya, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Ehrenbergh (2009, hlm.497), menegaskan bahwa secara umum penyebab keterbatasan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja yang mengakibatkan pengangguran dikarenakan ketidakcocokan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Selain karena faktor internal dari pasar tenaga kerja tersebut, juga dikarenakan adanya faktor eksternal, biasanya dikarenakan masuknya teknologi mutakhir ke dalam negeri, kompetisi ketat antar pelamar, serta kebijakan pemerintah yang dapat menghambat penyerapan angkatan kerja.

Pengangguran terkait erat dengan kemiskinan. Sukirno (2010, hlm.24), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan

karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Suparno (2010, hlm.50) menemukan bahwa banyaknya pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena tingkat pengangguran yang tinggi akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, maka perlu segera untuk dicarikan solusinya.

Permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu menjadi salah satu faktor penentu daya saing sebagai bangsa yang hidup dalam dunia global. Pendidikan bagi pengangguran perlu dirancang dengan orientasi pada kecakapan hidup untuk menyiapkan mereka agar yang siap memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Masyarakat memerlukan reorientasi pendidikan yaitu dari orientasi pencapaian tujuan (*subject matter oriented*) menjadi orientasi kecakapan hidup (*life skills oriented*).

Fakta mengenai permasalahan pengangguran, menurut Soedijarto (1997, hlm.314) menjadi landasan empiris dibutuhkannya pendidikan yang mampu membekali lulusan pendidikan umum dengan kemampuan khusus yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang. Dalam kaitannya dengan kebutuhan ini peranan pelatihan dan kursus kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat sangat penting dan strategis. Layanan pendidikan seperti ini juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan melalui jalur formal atau mereka yang putus sekolah. Dalam konteks ini posisi pendidikan nonformal menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan yang ada, sehingga pendidikan formal dan nonformal harus sama-sama diperhatikan secara seimbang. Pendidikan formal dan nonformal sesungguhnya sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Kursus dan pelatihan merupakan program pendidikan nonformal yang strategis dalam upaya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang menganggur. Kegiatan-kegiatan ini

diselenggarakan melalui program pendidikan luar sekolah yang merujuk pada program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi kecakapan hidup (*life skill*) agar masyarakat pengangguran memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu. Program pendidikan nonformal berupa pelatihan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau dengan swadaya masyarakat.

Salah satu program pendidikan untuk mengatasi pengangguran adalah melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun departemen lainnya telah banyak menggulirkan berbagai program yang mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru melalui berbagai program dan pelatihan di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) diselenggarakan berbagai program berbasis kewirausahaan, di antaranya program Kewirausahaan Usaha Mandiri untuk Keaksaran Fungsional, program Kewirausahaan Desa dan Kewirausahaan Perkotaan untuk Kejar Paket B dan C dan lain sebagainya, program Desa Vokasi, program Bantuan Khusus dan Keterampilan Kreatif, program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah mendorong program pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada Pebruari 2011.

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu program kegiatan pendidikan nonformal (PNF) atau pendidikan luar sekolah (PLS) dalam upaya memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat penganggur dan masyarakat miskin diharapkan menolong dirinya, mandiri, serta dapat membangun lingkungan, bangsa dan negaranya. (Kamil, 2010, hlm.138). Lembaga PNF atau PLS dapat memberikan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan materi pelajaran kewirausahaan dengan materi pokok atau tambahan pelatihan dan pendekatan yang menempatkan kewirausahaan sebagai program pendidikan tersendiri. (Sudjana, 2010, hlm.119).

Menurut kajian Prasetya (2011, hlm.103), dewasa ini banyak ditemui berbagai program kewirausahaan khususnya yang telah dilaksanakan swadaya oleh masyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, mulai dari penyimpangan pengelolaan program sampai pada ketidaksesuaian proses pembelajaran dalam pelatihan. Dampaknya dapat dilihat dari *output*, *outcome*, atau *impact* dari program tersebut. Telah banyak program pendidikan atau pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan pemerintah, namun masih banyak masyarakat yang belum mampu mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Sebagian besar dari mereka kembali pada aktivitas semula pasca program pelatihan, tanpa adanya perbaikan aktivitas ekonomi yang mampu menopang kehidupannya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Masalah tidak tercapainya tujuan pelatihan kewirausahaan secara optimal disebabkan oleh penyelenggara program yang tidak memasukan muatan kompetensi-kompetensi penunjang kewirausahaan dalam kurikulum penyelenggaraan program yang dilaksanakan. Pelatihan lebih banyak menitikberatkan pada muatan kompetensi keterampilan dengan hanya memberikan materi-materi keterampilan tertentu yang dapat digunakan untuk bekerja. Kondisi ini bertentangan dengan esensi pendidikan yang kemukakan oleh Dewey:

Warga belajar tidak hanya disiapkan agar siap bekerja, tapi juga bisa menjalani hidupnya secara nyata sampai mati. Warga belajar haruslah berpikir dan pikirannya itu dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran adalah gagasan yang harus dapat berfungsi nyata dalam pengalaman praktis. (John Dewey, 1859-1952 dalam Syohih, 2008).

Permasalahan yang teridentifikasi dari penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan di Bandar Lampung, hasil wawancara peneliti dengan tenaga pengelola pelatihan dan nara sumber diperoleh informasi bahwa muncul berbagai kendala ketika peserta pelatihan melakukan kegiatan wirausaha, di antaranya tidak dapat berjalannya tugas kelompok dalam kelompok usaha, sehingga menimbulkan konflik internal dalam kelompok yang menyebabkan anggota kelompok mengundurkan diri. Masalah lainnya adalah mengenai manajemen keuangan yang sering menimbulkan konflik karena ada anggota kelompok yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan anggota kelompok lain, sehingga menyebabkan

sistem pembukuan yang tidak bisa profesional. Kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar juga dialami oleh kelompok usaha yang bisa berjalan, namun peserta tidak mampu memecahkan masalah ini, karena mereka tidak memiliki jaringan pemasaran yang memadai dan hanya mengandalkan produk yang selama ini dibuat. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kompetensi kewirausahaan peserta pelatihan yang menyebabkan kegiatan wirausaha pasca program pendidikan kecakapan hidup tidak dapat berjalan dengan baik, karena pada saat program pelatihan berlangsung peserta pelatihan kurang mendapatkan pembekalan dan pembinaan kewirausahaan.

Program pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang terselenggara di Bandar Lampung hampir selalu berkaitan dengan ketersediaan proyek, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pelatihan yang diterapkan dirancang oleh pemerintah dan diseragamkan untuk seluruh daerah, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal di suatu daerah. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses pelatihan adalah ceramah dan tanya jawab, evaluasi hanya dilakukan pada akhir pelatihan dengan mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan oleh nara sumber kepada peserta, dan pembinaan pasca pelatihan dilakukan hanya bila timbul masalah. Proses pelatihan yang demikian menyebabkan tidak tercapainya kompetensi berwirausaha peserta secara optimal dan masalah ini ditengarai sangat berkaitan dengan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan, baik dalam perencanaan pelatihan, selama proses pelatihan maupun evaluasi pelatihan.

Proses pembelajaran seperti yang terjadi dalam pelatihan di Bandar Lampung berlangsung secara konvensional. Menurut Paint (2014, hlm.6), makna konvensional dalam pelatihan merujuk pada transfer keahlian dari pelatih ke peserta didik, di mana pelatih menentukan apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Pendekatan ini mengasumsikan aliran pengetahuan secara tidak langsung berasal dari pelatih, yang merupakan 'ahli', bagi pembelajar. Pembelajar memainkan peran pasif dan terikat untuk mempelajari apa yang diajarkan pelatih. Pendekatan pelatihan ini tidak mengizinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberi pelatih keseluruhan kendali atas prosesnya. Dalam pelatihan konvensional, semua kegiatan dari mendefinisikan tujuan hingga mengevaluasi

pembelajar, dilakukan oleh pelatih. Pilihan metode pelatihan didasarkan pada preferensi dan kenyamanan pelatih, dan sering menghasilkan dominasi ceramah. Penekanannya adalah pada materi pelajaran, atau konten, dan kompetensi pelatih dipastikan sebagai spesialis dalam mata latihnya. Oleh karena itu, pendekatan konvensional untuk pelatihan ini sangat dekat dengan pendidikan formal atau sekolah.

Kamil (2010, hlm.2) menyarankan bahwa suatu model pelatihan yang efektif bila dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kegiatan belajar dalam pelatihan dibangun atas dasar partisipasi aktif dari peserta dalam semua aspek kegiatan. Peserta didik didorong untuk menyuarakan ide atau gagasan mereka sendiri, mencari cara untuk memecahkan masalah, dan menyelidiki realitas berdasarkan pengalamannya. Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang peserta didik dewasa, maka model pelatihan konvensional bukan model pelatihan yang efektif, karena model ini mengabaikan pengetahuan dan pengalaman belajar orang dewasa. Orang dewasa umumnya belajar lebih baik dan mengingat apa yang mereka pelajari pada saat mereka mendengar informasi, melihat demonstrasi dan ilustrasi, mendiskusikan informasi dan ide, serta berlatih secara teknis.

Beberapa ahli memberi penjelasan mengenai pembelajaran partisipatif. Menurut Gibbs & Coffey (2004, hlm.89) pendekatan partisipatif merupakan pembelajaran inovatif yang memiliki fokus utama pada bagaimana peserta didik belajar dengan baik dan merupakan metode pengajaran yang menuntun peserta didik untuk melakukannya. Black, et al. (2006, hlm.123-124) menegaskan bahwa metode pengajaran partisipatif mewujudkan belajar dan mengajar yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik tetapi juga untuk menumbuhkan kebebasan berekspresi pada berbagai isu/masalah. Pembelajaran partisipatif terjadi ketika kehidupan, pengetahuan, minat, tubuh dan energi peserta didik berada di dalam ruang kelas pembelajaran (Thomson and Comber, 2003, hlm12). Ini mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif dan itu dapat dicapai terbaik jika para pelajar diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka. Berbeda dengan model pembelajaran konvensional yang

bercirikan praktik kelas berdurasi pendek, terisolasi, dan aktivitas belajar berpusat pada pendidik, maka model pembelajaran partisipatif (*participatory learning*) lebih menekankan pada kegiatan belajar yang relatif berdurasi lebih panjang, holistik, aktivitas belajar berpusat pada peserta didik, dan terintegrasi dengan praktik dan masalah-masalah dunia nyata. Pembelajaran partisipatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang mendorong peserta didik menyuarkan ide-idenya, mencari cara untuk memecahkan masalah, dan menyelidiki realitas berdasarkan pengalamannya.

Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah kantong pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014), diketahui bahwa daerah perkotaan di provinsi Lampung termasuk kota Bandar Lampung masih menjadi kantong pengangguran yang ditujukan dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,07% dibandingkan dengan pedesaan yang mencapai 3,72%. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung atau masyarakat secara swadaya telah mengupayakan berbagai pelatihan, baik pelatihan keterampilan teknis maupun pelatihan kewirausahaan, hanya saja hasilnya belum optimal. Pelatihan yang selama ini dilakukan kurang menyentuh pada masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan nyata. Pada umumnya pengangguran di kota Bandar Lampung merupakan penduduk usia produktif, sehingga dipandang penting untuk segera diatasi agar dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dengan memberikan pelatihan termasuk pelatihan berwirausaha yang inovatif dan memberdayakan, akan mengurangi dampak negatif berupa rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menjadi hambatan pembangunan bangsa dan negara. Kondisi-kondisi tersebut mendorong peneliti menjadikan pengangguran perkotaan sebagai subjek penelitian dan Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian.

Salah satu strategi pembelajaran dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan yang relevan dengan kondisi objektif di lapangan adalah strategi pembelajaran partisipatif. Pelatihan dengan pembelajaran partisipatif merupakan model pelatihan yang menerapkan pembelajaran dengan melibatkan pembelajar secara aktif mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi (Sudjana, 2010). Pembelajaran

menjadi lebih bermakna karena pembelajar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran dan mengaktualisasikan kemampuan dan pengalamannya dalam memecahkan masalah nyata tertentu, sementara pelatih berperan sebagai fasilitator atau mediator.

Merujuk pada paparan latar belakang masalah, dipandang penting untuk menyelenggarakan pelatihan berwirausaha bagi pengangguran perkotaan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dengan permasalahan di lapangan. Pelatihan berwirausaha bagi pengangguran perkotaan diasumsikan akan efektif dengan menerapkan strategi pembelajaran partisipatif. Strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembelajaran dan karakteristik belajar orang dewasa, serta mendorong terjadinya interaksi dalam rangka pemecahan masalah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran terbuka di kota Bandar Lampung masih cukup tinggi yaitu 11,42 %. Salah satu upaya untuk mengatasinya pemerintah memfasilitasi dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan masyarakat bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur.
2. Pengangguran terbuka, khususnya pengangguran perkotaan perlu segera diatasi. Jika tidak diatasi akan banyak memberikan dampak negatif dan dapat menjadi beban dalam proses pembangunan.
3. Bandar Lampung merupakan daerah yang memiliki jumlah pengangguran cukup tinggi. Mereka umumnya memiliki keterbatasan untuk mengembangkan potensinya agar dapat berpenghasilan layak, memiliki tingkat pendidikan, motivasi dan keterampilan yang rendah, serta kurangnya akses untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan potensi *entrepreneurship* atau jiwa kewirausahaan.
4. Banyak pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan dalam membangun individu yang berjiwa *entrepreneur* tetapi masih bersifat konvensional. Pelatihan belum menciptakan perubahan perilaku peserta untuk mencari dan mengenali peluang usaha. Metode pembelajaran yang dilakukan selama ini

dalam pelatihan kurang melibatkan peserta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengembangan. Pembelajaran belum mencerminkan pelatihan berwirausaha secara aplikatif terutama dalam mengenali peluang berwirausaha dan pengelolaannya sehingga menyebabkan peserta pelatihan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya pada kehidupan yang nyata.

5. Penduduk usia produktif yang menganggur di Bandar Lampung kurang memiliki kompetensi berwirausaha khususnya terkait dengan langkah-langkah berwirausaha mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengembangkan usaha.

Temuan pada studi pendahuluan menunjukkan bahwa berbagai pelatihan termasuk pelatihan kewirausahaan yang selama ini dilakukan belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Pasca pelatihan, warga belajar belum yakin dengan usaha yang dirintis bersama kelompoknya, pengelolaan keuangan yang belum baku karena tidak adanya kesepakatan antar anggota, dan kesulitan dalam hal pemasaran. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kompetensi berwirausaha warga belajar yang menyebabkan kegiatan wirausaha pasca program pendidikan kecakapan hidup tidak dapat berjalan dengan baik. Kompetensi berwirausaha yang rendah ini dapat pula disebabkan oleh kurangnya mendapatkan pembekalan dan pendampingan kewirausahaan saat pelatihan berlangsung.

Output dan *outcome* pelatihan kewirausahaan yang belum optimal, ditengarai oleh strategi atau metode pembelajaran yang diterapkan dalam pelatihan belum dapat meningkatkan kompetensi yang diharapkan. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam pelatihan belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan hasil belajar peserta pelatihan. Fenomena ini dapat dilihat dari belum adanya perubahan positif yang terjadi pada peserta pelatihan, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Proses pembelajaran yang diharapkan adalah proses pembelajaran yang terjadi dalam suasana yang saling menghormati dan saling menghargai baik antara tutor atau nara sumber dengan peserta pelatihan, maupun antar peserta pelatihan saling membelajarkan, adanya kerjasama sehingga tercipta iklim belajar yang diinginkan oleh peserta pelatihan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh peserta pelatihan dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran dalam pelatihan yang masih didominasi oleh tutor atau nara sumber. Peserta pelatihan belum diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal mengidentifikasi minat dan kebutuhan belajarnya sehingga materi pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga belajar. Demikian pula dalam hal perumusan tujuan dan penyusunan perencanaan pembelajaran, masih cenderung dilakukan sendiri oleh tutor, sehingga peserta pelatihan belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang menjadi tujuan serta bagaimana cara belajarnya. Hal ini berakibat pada rendahnya motivasi peserta pelatihan untuk belajar, sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada beberapa identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada: “Model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Bandar Lampung”. Secara khusus rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi objektif pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah model konseptual pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah implementasi model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Bandar Lampung?
4. Bagaimana efektivitas model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kondisi objektif pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung.
- b. Mengembangkan model konseptual pelatihan partisipatif untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung.
- c. Mengetahui implementasi model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung.
- d. Mengetahui efektivitas model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha pengangguran perkotaan di Kelurahan Beringin Raya Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Model pelatihan partisipatif dalam meningkatkan kompetensi berwirausaha masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Keberhasilan pelatihan partisipatif dapat dilihat melalui pemahaman masyarakat secara konseptual maupun aplikatif, sebagai wujud dari hasil belajarnya. Kompetensi berwirausaha menuntut masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan wirausaha namun juga aplikatif dan kreatif dalam membangun usaha, sehingga diperlukan model pelatihan partisipatif yang memberikan stimulasi masyarakat untuk mandiri. Penggunaan model pelatihan partisipatif untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha yang diharapkan akan mampu mengkondisikan masyarakat untuk merencanakan, membuat langkah-langkah usaha yang sistematis, membuat produk batik, memasarkan produk batik serta mengevaluasi

produk batik tersebut secara tepat. Secara teoritik, penelitian ini akan menemukan model pelatihan kewirausahaan yang memuat prinsip-prinsip dan langkah-langkah pembelajaran partisipatif dengan mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik pengangguran perkotaan.

- b. Wirausaha sering hanya melihat batik sebagai sebuah produk yang dimanfaatkan sebagai ladang usaha, sehingga orientasinya hanya pada keuntungan semata. Melalui pengembangan model pelatihan partisipatif, secara teoritik dan aplikatif akan lebih ditekankan pada peningkatan kompetensi berwirausaha masyarakat penganggur.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah dan pengembangan keilmuan pendidikan nonformal, khususnya dalam hal pengembangan konsep dan teori pelatihan bagi masyarakat pengangguran. Dengan fokus penelitian untuk menemukan model, maka penelitian ini pun diharapkan akan menjadi *prototype* model pelatihan partisipatif dalam hal meningkatkan kompetensi berwirausaha masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dalam memilih model yang tepat dalam pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi masyarakat yang berstatus pengangguran. Diseminasi temuan penelitian ini diharapkan akan membuka wawasan yang lebih luas bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk menggunakan model pelatihan partisipatif yang memiliki keunggulan untuk menghasilkan hasil belajar dan memberikan nilai tambah pada diri peserta pelatihan.
- b. Dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menganggur atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pengangguran.
- c. Manfaat praktis bagi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelatihan partisipatif meliputi informasi yang detail tentang:
 - 1) Model desain atau rencana pelaksanaan pelatihan partisipatif untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha,
 - 2) Langkah-langkah yang

sistematis dalam pelaksanaan pelatihan partisipatif dengan penggunaan andragogi serta sinergi materi kewirausahaan, 3) Deskripsi peran fasilitator selama proses pelatihan, 4) Informasi mengenai bentuk penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar peserta maupun pelaksanaan pelatihan.

- d. Manfaat praktis bagi masyarakat yang menganggur dari pelatihan partisipatif kewirausahaan adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang aktual dan komprehensif sebagai bentuk hasil belajar. Pengetahuan, keterampilan dan sikap tersebut akan membentuk kompetensi kewirausahaan yang akan bermanfaat dalam dalam jangka panjang sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Penyusunan disertasi ini didasarkan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015, dimana terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang berkaitan dengan kondisi pengembangan sumber daya manusia, masyarakat pengangguran dan rendahnya kompetensi berwirausaha masyarakat. Sub-bab selanjutnya adalah identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II adalah kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Bab ini membahas tentang berbagai konsep yang relevan dengan topik kajian disertasi, seperti konsep pendidikan nonformal, konsep dasar pelatihan, konsep pelatihan partisipatif, konsep kompetensi dan konsep kewirausahaan. Selanjutnya juga dibahas penelitian yang relevan serta kerangka berpikir.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Bab ini menerangkan pada kerangka metodologi yang dipakai dalam penelitian disertasi ini diantaranya: lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi umum Kelurahan

Beringin Raya, kondisi objektif pelatihan kewirausahaan, model konseptual pelatihan partisipatif, implementasi model pelatihan partisipatif, dan efektivitas pengembangan model pelatihan partisipatif yang datanya diperoleh dari subjek penelitian. Selanjutnya juga diuraikan pembahasan terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Bab ini secara singkat menggambarkan hasil akhir dari penelitian ini, dan saran yang ditawarkan berdasarkan temuan penelitalin dalam kesimpulan.